



## PRESS RELEASE

No. 214/BPPI 2009

Akhir-akhir ini Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengamati dan mendapat banyak informasi tentang kasus-kasus penelantaran dan perusakan situs-situs bersejarah di Indonesia. BPPI juga menerima berbagai pernyataan keprihatinan dan sekaligus kepedulian baik dari media massa maupun masyarakat sebagai reaksi terutama terhadap kasus-kasus tersebut di bawah ini :

### 1. Situs Majapahit di Trowulan, Mojokerto

Pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) telah merusak situs permukiman kota kuno Majapahit. Kebijakan Dirjen Sejarah dan Purbakala pada 19 Desember 2008 agar menghentikan pembangunan untuk sementara, berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi PIM pada 5 Desember 2008 (*rekomendasi terlampir*), ternyata tidak ditanggapi oleh pelaksana karena pembangunan tetap dilanjutkan Bahkan Pimpinan Proyek PIM dan institusi terkait di lapangan (BP3 Provinsi Jawa Timur) menyatakan tetap akan melanjutkan pembangunan (*kliping artikel Kompas 4 Januari 2009 terlampir*).

### 2. Benteng Vastenburg di Kota Solo

Adanya informasi mitra dan anggota BPPI di Kota Solo bahwa Benteng Vastenburg akan dibangun menjadi hotel berlantai banyak. Pembangunan ini diperkirakan akan merusak keaslian benteng dan nilai historisnya.

### 3. Benteng Oranje (Malayo) di Kota Ternate

Benteng Oranje dipugar oleh pemerintah, tata caranya dilakukan secara tidak tepat. Terjadi penggantian lantai dinding benteng dan perubahan teknik perekatan dengan plesteran pada dinding luar benteng. Aliansi Pemerhati Warisan Budaya Ternate sudah mengeluarkan tuntutan pada 3 November 2008 kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkot Ternate serta Dirjen Sejarah dan Purbakala untuk menghentikan pekerjaan serta melakukan peninjauan kembali hasil studi kelayakan (*Surat Tuntutan Aliansi Pemerhati Warisan Budaya Ternate 3 November 2008, Surat Direktur Peninggalan Purbakala 13 November 2008, dan Kliping Artikel Kompas 2 Januari 2009 terlampir*). Namun, tuntutan ini tidak mendapat tanggapan yang memadai dari Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut BPPI meminta dengan sangat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata segera mengambil langkah-langkah tegas dan memberikan kepastian terhadap pelestarian situs-situs bersejarah dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

**1. Situs Majapahit di Trowulan, Mojokerto:**

- menghentikan pembangunan dan melakukan rehabilitasi situs yang sudah terlanjur dirusak tanpa harus mengejar target waktu selesai sebelum Pemilu 2009
- melakukan prioritas pelestarian dengan ekskavasi secara keseluruhan termasuk Situs Segaran III dan IV yang selama ini belum diteliti, sebelum melakukan pembangunan lainnya.
- melakukan dialog untuk mendapatkan kejelasan rencana desain bangunan dan pemanfaatannya serta mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat.

**2. Benteng Vastenburg:**

- melengkapi aspek legal Benteng Vastenburg sebagai Benda Cagar Budaya yang harus dilindungi.
- melakukan penelitian menyeluruh baik secara arkeologis, amdal, dan arsitektural untuk rehabilitasi dan pemanfaatan selanjutnya
- melakukan dialog untuk meminta kejelasan rencana pemanfaatannya dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat

**3. Benteng Oranje:**

- menghentikan pemugaran dan merehabilitasi situs yang sudah terlanjur rusak dalam pekerjaan pemugaran.
- memperbaiki upaya pelestarian dengan melakukan proses pemugaran secara benar.
- melakukan dialog untuk meminta kejelasan rencana pemugaran dan pemanfaatannya, serta melakukan sosialisasi hasilnya kepada masyarakat.

Mengingat masih banyaknya kerusakan dan pengrusakan pusaka di seluruh penjuru tanah air, maka BPPI meminta kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk membenahi sistem perlindungan dan pengelolaan berbagai ragam pusaka di Indonesia, termasuk aspek legalitas yang mendukung.